

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA DI KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) dalam
Bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Erlangga Yunus Ali Nurbaya

NIM : I91218071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2023

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Erlangga Yunus Ali Nurbaya
NIM : I91218071
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi
Pariwisata di Kabupaten Ngawi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 21 Maret 2023

Yang menyatakan


A 10000 stamp with the Garuda emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '299BAJX018813831' is placed over the signature.

Erlangga Yunus Ali Nurbaya

I91218071

Scanned by TapScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Erlangga Yunus Ali Nurbaya

NIM : I91218071

Program Studi : Ilmu Politik

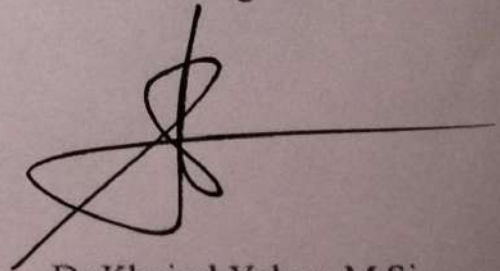
Yang berjudul :

“Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi”

Saya berasumsi bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, Maret 2023

Pembimbing



Dr Khoirul Yahya, M.Si

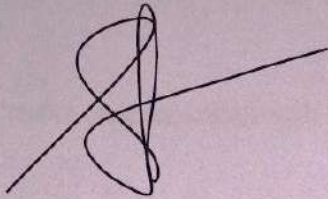
NIP.197202062007101003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Erlangga Yunus Aki Nurbaya dengan Judul : “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal ...

Tim Penguji Skripsi

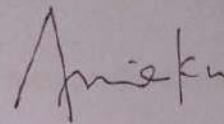
Penguji I



Dr Khoirul Yahya M.Si

NIP. 197202062007101003

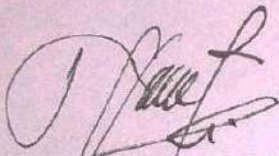
Penguji II



Dr Aniek Nurhayati M.Si

NIP. 196909071994032001

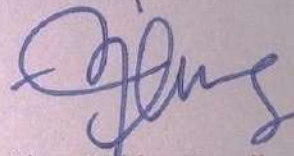
Penguji III



Noor Rohman M.A

NIP. 198510192015031001

Penguji IV



Ajeng Widya Prastika, M.A

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr Abd Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlangga Yunus Ali Nurbaya
NIM : 191218071
Fakultas/Jurusan : FISIP/Illmu Politik
E-mail address : i91218071@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI
PARIWISATA DI KAUPATEN NGAWI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis

(Erlangga Yunus Ali Nurbaya)

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Erlangga Yunus Ali Nurbaya, 2023. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi.* Skripsi Program Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan, Potensi Pariwisata

Pada dasarnya Kabupaten Ngawi memiliki keanekaragaman wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan yang berupa wisata alam, wisata buatan, desa wisata dan wisata sejarah. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Ngawi antara lain Air Terjun Srambang, Taman Rekreasi Tawun, Taman Jamus, Air Terjun Pengantin, Desa Wisata Kayangan dan Museum Trinil yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan daerah dan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal dekat dari industri pariwisata tersebut.

Tujuan dari Penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi dan kendala apa saja yang membuat pariwisata Kabupaten Ngawi masih kalah saing dengan daerah lain

Metode penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif Kualitatif dan memakai Implementasi Kebijakan, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi Untuk proses Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan untuk proses keabsahan data peneliti menggunakan tehnik Triangulasi tehnik dan sumber.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ngawi adalah melaksanakan penyusunan, pendataan, perencanaan, pengkoordinasian kegiatan, dan program kerja di bidang pariwisata upaya ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupate Ngawi (RIPPARKAB) Tahun 2020-2035 dan dalam pelaksanaanya terdapat kendala dalam penerapannya.

ABSTRACT

Erlangga Yunus Ali Nurbaya, 2023. The Role of Regional Government in Developing Tourism Potential in Ngawi Regency. Political Science Program Thesis, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keywords: Role of Regional Government, Development, Tourism Potential

Basically, Ngawi Regency has a diversity of tourism spread across several sub-districts in the form of natural tourism, artificial tourism, village tourism and historical tourism. Several tourist destinations in Ngawi Regency include Srambang Waterfall, Tawun Recreation Park, Jamus Park, Pengantin Waterfall, Kayangan Tourism Village and Trinil Museum which have the potential to generate regional income and income for people who live close to the tourism industry.

The aim of this research is to find out the extent of the Regional Government's role in developing tourism potential in Ngawi Regency and what obstacles make Ngawi Regency tourism still less competitive with other regions.

This research method uses qualitative descriptive research methods and uses policy implementation, data collection techniques using observation, interviews and documentation. For the data analysis process, data reduction, data presentation and conclusion drawing are used, and for the data validity process, researchers use triangulation techniques and sources.

The results of this research show that the role of the Regional Government in Tourism Development in Ngawi Regency is to carry out preparation, data collection, planning, coordinating activities and work programs in the tourism sector. This effort is carried out based on Ngawi Regency Regional Regulation Policy Number 9 of 2020 concerning Development Master Plans. Ngawi Regency Tourism (RIPPARKAB) 2020-2035 and in its implementation there are obstacles in its implementation.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Manfaat	4
E. Definisi Konseptual	5
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	21
C. Kerangka Teori	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1. Lokasi Riset	38
2. Waktu Riset	39
C. Pemilihan Subjek Penelitian	39
D. Tahapan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	46

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kabupaten Ngawi	47
B. Peraturan Daerah Tentang Ripparkab	64
C. Implementasi Tentang Ripparkab	66
D. Kendala yang dihadapi	79

Bab V PENUTUP

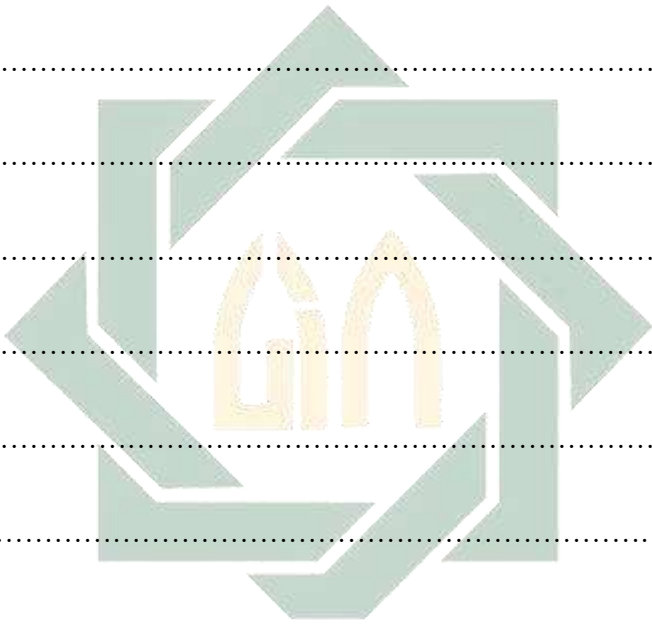
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	----

LAMPIRAN	89
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	1
Tabel 2	12
Tabel 3	40
Tabel 4	49
Tabel 5	53
Tabel 6	59
Tabel 7	68
Tabel 8	71
Tabel 9	72
Tabel 10	75
Tabel 11	76
Tabel 12	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	48
Gambar 2	51
Gambar 3	95
Gambar 4	95
Gambar 5	96
Gambar 6	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ngawi memiliki banyak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor pendongkrak perekonomian karena kondisi wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi dan beberapa wilayah yang merupakan bagian dari pegunungan Lawu.

Kabupaten Ngawi memiliki keanekaragaman wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan yang berupa wisata alam, desa wisata dan wisata sejarah. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Ngawi antara lain Air Terjun Srambang, Taman Rekreasi Tawun, Taman Jamus, Air Terjun Pengantin, Desa Wisata Kayangan, Museum Trinil, dan lain-lain berpotensi menghasilkan pendapatan daerah dan pendapatan bagi masyarakat yang tinggal dekat dari industri pariwisata.

Tabel 1. Data Kunjungan wisatawan di obyek wisata Kab. Ngawi

No.	Tempat Wisata	Jumlah Pengunjung		
		2019	2020	2021
1.	Air Terjun Srambang	243.218	93.095	-
2.	Taman Rekreasi Tawun	131.123	42.380	-
3.	Kebun The Jamus	88.621	46.914	-
4.	Air Terjun Pengantin	23.722	8.622	18.888
5.	Desa Wisata Kayangan	-	-	10.500
6.	Museum Trinil	23.337	12.241	6.871

(Sumber : Data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi)

Berdasarkan tabel berikut, Kabupaten Ngawi memiliki kekayaan potensi wisata berbasis wisata alam, desa wisata, dan wisata sejarah yang merupakan salah satu indikasi potensi ekonomi daerah. Perekonomian daerah dapat ditingkatkan dengan industri pariwisata, karena data jumlah kunjungan objek wisata di Kabupaten Ngawi berubah dari tahun ke tahun.

Untuk mendorong pertumbuhan pariwisata lokal yang memiliki potensi besar dan akan meningkatkan pembangunan di banyak daerah, pemerintah daerah harus memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan.

Dengan adanya strategi dan sikap kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi untuk memastikan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi dapat dikenal oleh masyarakat luas, maka potensi obyek wisata di Kabupaten Ngawi sangatlah besar. Selain itu, perkembangan industri pariwisata dapat menjadi wadah untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bekerja di industri tersebut.

Berpartisipasi aktif dalam pembangunan, bagi masyarakat di dekat tujuan wisata populer, industri pariwisata dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja di industri seperti hotel, rumah makan, pemandu wisata, dan biro perjalanan. Serta upaya membangun atau memelihara jalan dan program kebersihan merupakan contoh bagaimana sektor pariwisata secara langsung mendukung industri lain dan dapat menguntungkan baik penduduk lokal maupun pengunjung. Baik di negara berkembang maupun negara maju,

industri pariwisata mendorong dan membantu pengembangan proyek di berbagai sektor.¹

Pembangunan harus dilaksanakan dengan terencana dan jelas, pembangunan pariwisata merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengelolaan obyek pariwisata harus memiliki aspek yang harus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat dan mengeluarkan potensi pariwisata secara maksimal.

Melihat keseriusan Kabupaten Ngawi didalam mengembangkan potensi di sektor pariwisatanya pasti membutuhkan sebuah strategi pengembangan yang terencana dan tersusun rapi dan sejalan dengan strategi yang ada di pemerintah pusat sehingga potensi pariwisata yang dikembangkan dapat berjalan dengan optimal / maksimal. Dalam strategi pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai motor penggerak dan memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi untuk menentukan Strategi-strategi dalam pengembangan potensi pariwisata.

Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam melakukan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi.

¹ Hadi Sri Utami/ Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2017) 13-20

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas yang berfokus pada permasalahan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, maka Peneliti membentuk permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam memaksimalkan potensi wisata daerah?
2. Mengapa Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi masih tertinggal dibanding dengan Wilayah lain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mengetahui Peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam memaksimalkan potensi wisata daerah.
2. Mengetahui mengapa Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi masih tertinggal dibanding wilayah lain.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa aspek, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam hal Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi serta dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan kepada Pemerintah daerah baik dari Kabupaten Ngawi maupun daerah lain agar lebih baik lagi dalam pengembangan potensi Pariwisata di daerahnya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat umum agar mengetahui seberapa jauh peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi, dan juga dapat menjadi referensi bacaan baik kalangan akademis maupun khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang sosial politik.

E. Definisi Konseptual

Dalam sebuah penelitian diperlukan penjelasan suatu konsep secara singkat dan jelas untuk menyamakan interpretasi, maka konsep dasar penelitian ini adalah :

1. Peran

Suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang menjaditanggung jawab seseorang melaksanakan sesuatu.²

Pengertian peran sebagai berikut:

² Poerwadarminta W.J.S (2004)

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.³

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.⁴

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010)

⁴ Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali. Jakarta.

mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.⁵

2. Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai dengan asas tugas pembantuan dan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diacu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pemerintah daerah menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan dalam justifikasinya atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 1945. Gubernur, Bupati, atau Walikota adalah contoh penyelenggara pemerintahan daerah pejabat, bersama-sama dengan perangkat daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas

⁵ Ibid

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Setelah UU No.23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dalam ketentuan yang diatur dalam ayat 3 pasal 26 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengalkan Pancasila, melaksanakan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
- j. Menjalin hubungan dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan rapat paripurna DPRD.

3. Pariwisata

Pariwisata mengacu pada perjalanan sementara yang diselenggarakan dari lokasi lain dengan tujuan tunggal menikmati perjalanan untuk melihat-lihat dan bersenang-senang untuk memenuhi berbagai kebutuhan daripada melakukan bisnis atau mencari nafkah di tempat tujuan.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta Multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 Bab yang sebagai rancangan berpikir dan mempermudah dalam memaparkan hasil Penelitian. Adapun rancangan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang pembahasannya dijelaskan mengenai hal umum sampai hal khusus yang sesuai dengan tema permasalahan dan juga ada didalamnya tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian dan sistematika pembahasan pada penyusunan skripsi ini.

2. Bab II Kajian Teoritik

Bab ini berisikan kajian teoristik yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka teori. Dimana pada tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Setelah itu kerangka teori yang berisi teori apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

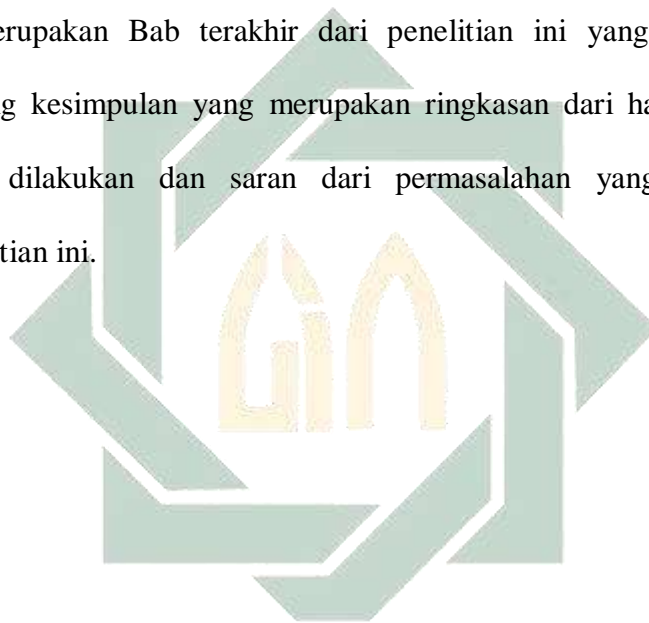
Berisikan tentang metodologi penelitian, menguraikan dan menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian secara spesifik dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dan teknis pemeriksaan keabsahan data.

4. Bab IV Penyajian dan Analisi Data

berisikan gambaran umum tempat penelitian dan analisis yang berisikan penyajian informasi yang diperoleh oleh peneliti, serta analisis informasi dengan menguraikan tentang hasil temuan yang diperoleh ketika melakukan penelitian.

5. Bab V Penutup

Merupakan Bab terakhir dari penelitian ini yang menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan penelitian peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil Temuan
1.	Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu. <i>Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapat Asli Daerah (Studi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)</i> ⁶	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dalam rangka mendapatkan data sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dilapangan dianalisa menggunakan metode analisa interaktif dari Miles Huberman , yaitu peneliti dituntut untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kabupaten Mojokerto sebenarnya mempunyai obyek wisata yang berpotensi menarik minat para wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat 10 objek wisata daerah yang juga dikelola Pemerintah Daerah, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto masih kurang optimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki tiap-tiap objek tersebut. Belum adanya aturan hukum atau Peraturan Daerah (PerDa) yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Mojokerto
2.	Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd Karim,	Pemerintah Daerah Dalam melakukan pemberdayaan obyek pariwisata kabupaten Simeulue, telah melakukan upaya melalui pemberdayaan

⁶ Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu. Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 2, Hal 325-331

	<p>Nanda Safangawan. <i>Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dalam Pemberdayaan Potensi Pariwisata.</i>⁷</p>	<p>kepada masyarakat sadar wisata untuk menunjang minat dari masyarakat akan besarnya peluang peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pengembangan obyek pariwisata yang ada di desanya sendiri. Masyarakat desa sadar wisata dapat mengelolah potensi pariwisata yang ada didesanya sendiri dengan memanfaatkan sumber anggaran dana desa (ADD) untuk pengembangan potensi pariwisata menjadi obyek destinasi pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat di desa tersebut. Dalam melakukan pemberdayaan obyek pariwisata kabupaten Simeulue, pemerintah daerah juga telah melakukan upaya lain melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pengadaan fasilitas-fasilitas umum pendukung utama pariwisata seperti pembangunan dermaga apung, fasilitas MCK, gubuk-gubuk istirahat, pegadaan fasilitas selam dan lain sebagainya. Upaya lainnya yang dilakukan dalam pengembangan obyek pariwisata ialah dengan mempromosikan potensi-potensi pariwisata yang ada dikabupaten Simeulue melalui media sosial, media cetak dan mengadakan event-event nasional maupun internasional dengan tujuan agar potensi pariwisata di kabupaten Simeulue dapat dikenal oleh para wisatawan diseluruh dunia.</p>
3.	<p>Sefira Ryalita Primandany, Mardiyono, Riyanto. <i>Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)</i>⁸</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di sini peneliti bermaksud akan menggambarkan tentang analisis strategi pengembangan di sektor pariwisata daerah di Kabupaten Nganjuk beserta faktor penghambatnya dalam pengembangan pari-wisata di daerahnya. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Nganjuk dan yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (2007, h.289) yang menge-</p>

⁷ Alimas Jonsa, Erly Hasyim, Abd Karim, Nanda Safangawan. Peran Pemerintah Kabupaten Simeuleu dalam Pemberdayaan Potensi Paariwisata. *Public Administration Journal*, 1 (4), 318-334.

⁸ Sefira Ryalita Primandany, Mardiyono, Riyanto. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.4, Hal. 135-143

		<p>mukakan bahwa ada tiga kelompok analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.</p> <p>Di Kabupaten Nganjuk sebenarnya mempunyai banyak objek wisata yang berpotensi menarik minat para wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Nganjuk. Terdapat empat objek wisata daerah yang juga dikelola oleh pemerintah daerah khususnya di bawah pengawasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk sebagai pengelola pariwisata tersebut. Keempat objek wisata yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah meliputi: tiga objek wisata alam dan satu objek wisata buatan, yaitu objek wisata Air Terjun Sedudo, Air Merambat Roro Kuning, Goa Margotresno, dan objek wisata buatan Taman Rekreasi Anjuk Ladang. Keempat objek wisata tersebut masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk masih kurang optimal dalam mengem-bangkan potensi yang dimiliki di tiap-tiap objek wisata tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk masih belum maksimal dalam melakukan pengem-bangan objek wisata Nganjuk. Buktinya belum berjalannya program-program terkait pengembangan wisata daerah karena terhalang dengan dana yang terbatas, sedangkan objek wisata yang perlu perbaikan dan pengembangan banyak.</p> <p>Belum adanya aturan hukum atau Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Nganjuk sehingga rencana-rencana atau program yang telah dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah kabupaten Nganjuk dengan para koordinasi lapangan di empat objek wisata tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh.</p>
4.	<p>Dadan Mukhsin, ST. MT. <i>Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)</i>⁹</p>	<p>Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan teknik survei, baik survei sekunder maupun survei primer. <i>Pertama</i>, Survei Sekunder merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam bentuk buku laporan dan statistik. Survei Sekunder diperoleh dari studi pustaka dan studi instansi. Studi pustaka digunakan untuk mengetahui data dan teori yang berhubungan dengan materi pekerjaan. Studi pustaka diperoleh dari telaahan studi terdahulu yang telah dilakukan</p>

⁹ Dadan Mukhsin, ST. MT. Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaraatu Kabupaten Tasikmalaya). Program Studi Perencanaan Wilayah

		<p>dengan maksud untuk memperoleh wawasan mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan materi pekerjaan. Survei instansi bertujuan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan strategi pengembangan pariwisata. <i>Kedua</i>, Survey Primer Survei ini dilakukan untuk mendapatkan data terbaru/terkini langsung dari lapangan atau obyek kajian. Pengumpulan data primer ini sendiri akan dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu metode observasi langsung ke lapangan dan metode penyebaran kuesioner atau wawancara. Penentuan penggunaan kedua metode ini dilakukan berdasarkan jenis data yang dibutuhkan.</p> <p>Wisata yang berada di Kecamatan Sukaratu memiliki potensi yang sangat luar biasa, potensi tersebut diantaranya adalah keindahan kawah, keindahan alam di sekeliling wisata Gunung Galunggung lahan kosong yang berpotensi, terdapat zona konservasi dan lain-lain. Pengunjung pun akan lebih mudah menuju ke kawasan wisata tersebut karena selain memiliki potensi yang luar biasa, wisata Gunung Galunggung merupakan kawasan yang strategis dengan lokasinya yang berada di pusat kota, sehingga membuat kawasan tersebut memiliki nilai lebih dari para pesaing-pesaingnya. Wisata Gunung Galunggung terdapat beberapa kegiatan wisata tersebut diantaranya adalah, hiking, berfoto-foto, taman kanak-kanak, kuliner, dan pemandian air panas.</p> <p>Strategi utama pengembangan wisata (Core Strategy) yang terdiri dari customer strategy dengan menjelaskan brand image strategy yaitu dengan menjelaskan obyek dan produk unggulan dengan tema-tema tertentu yang kompetitif. Dalam pengembangan <i>Core Strategy</i> ada beberapa komponen yaitu : Strategi Pengembangan Perwilayahan Pariwisata, Strategi Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur, Strategi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata</p>
5.	Choridotul Bahiyah, Wahyu Hidayat R, Sudarti. <i>Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai</i>	<p>Penelitian ini dilakukan Timur Kabupaten Probolinggo, yakni di Kecamatan Paiton. Fokus penelitian ini meliputi tentang Strategi Pengembangan potensi pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Agar tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode Analisis SWOT. SWOT adalah suatu metode</p>

	<p><i>Duta Kabupaten Probolinggo</i>¹⁰</p>	<p>analisa dari lingkungan internal Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) serta lingkungan eksternal Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) yang dihadapi di dunia bisnis. Analisa didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan (kekuatan) Strengths namun secara bersamaan dapat meminimalkan (kelemahan) Weaknesses dan (ancaman) Threats. Selanjutnya dilakukan analisa melalui tahapan reduksi data, model data, klasifikasi data serta kesimpulan sehingga diperoleh strategi pengembangan obyek wisata pantai Duta (Rangkuti, 2008).</p> <p>Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap stake holder (Dinas Pariwisata, BAPEDA, pemuda, masyarakat dan pengunjung) di lapangan dengan menggunakan analisa SWOT, maka strategi pengembangan obyek wisata yang tepat pada obyek wisata pantai Duta antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemberdayaan, penyuluhan agar menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masyarakat sadar wisata. 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta. 3. Mengembangkan atraksi pariwisata. 4. Memperbaiki dan mengadakan fasilitas sarana prasarana obyek wisata. 5. Mengadakan aksesibilitas pariwisata
6.	<p>Rina Masruroh, Neni Nurhayati. <i>Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan</i>¹¹</p>	<p>Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang meliputi data potensi pariwisata, data Pendapatan Asli daerah, data Objek wisata, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.</p> <p>Bagi Kabupaten Kuningan sebagai daerah konservasi, pariwisata merupakan sektor utama yang harus dikembangkan. Hal ini didukung oleh kondisi alam dan sejarah Kuningan yang kaya akan potensi pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian, Kabupaten Kuningan harus memiliki kawasan unggulan destinasi wisata yang menjadi prioritas</p>

¹⁰ Choridotul Bahiyah, Wahyu Hidayat R, Sudarti. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu ekonomi Vol.2 Jilid 1/Tahun 2018 Hal. 95-103

¹¹ Rina Masruroh, Neni Nurhayati. Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. Universitas Kuningan.

		<p>pengembangan dengan pertimbangan multiflyer efek secara ekonomi. Strategi yang dapat dilakukan adalah komitmen pemerintah mengenai fokus pembangunan pariwisata daerah, meluncurkan konsep <i>City branding</i> sebagai ikon pariwisata yang khas, meningkatkan kemitraan dan hubungan antar lembaga dalam pengelolaan pariwisata, dukungan regulasi serta pengembangan Sumber Daya Manusia. Strategi tersebut dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata di Kabupaten Kuningan.</p>
7.	<p>Rotua Kristin Simamora, Rudi Salam Sinaga. <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Timur.</i>¹²</p>	<p>Pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada beberapa konsep, seperti: Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar mancanegara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumberdaya pariwisata yang ada. Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator dan dinamisator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara.</p> <p>Untuk mengembangkan berbagai potensi daerah termasuk potensi wisata perlu didukung oleh sektor penunjang, yaitu sarana dan prasarana. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat seperti sarana transportasi, dan irigasi senantiasa dihadapkan pada kendala keterbatasan kemampuan pendanaan. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupaya untuk memenuhi fasilitas-fasilitas publik yang strategis yang meliputi: Sarana dan Prasarana Transportasi.</p>
8.	<p>Rizal Kurniansah, Lia Rosida. <i>Strategi Pengembangan</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang fokus pada pengembangan pariwisata perkotaan Kota Mataram. Metode dan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, studi</p>

¹² Rotua Kristin Simamora, Rudi Salam Sinaga. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4 (1) (2016): 79-96

	<p><i>Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism) Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat</i>¹³</p>	<p>pustaka dan dokumentasi. Informan tersebut terdiri dari pihak pemerintah, tokoh masyarakat, pelaku usaha wisata, dan masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata, wisatawan mancanegara dan domestik. Metode dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan analisis SWOT.</p> <p>Berdasarkan pada hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Potensi pariwisata perkotaan (<i>urban tourism</i>) sebagai daya tarik wisata kota mataram sudah lengkap, Partisipasi <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata perkotaan Kota Mataram yaitu partisipasi pemerintah dengan melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung keberadaan daya tarik wisata perkotaan Kota Mataram belum terlalu maskimal dan merata di seluruh daya tarik wisata di seluruh Kota Mataram. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam melakukan perencanaan, pengembangan dan pengawasan karena masih terbatasnya pengalaman dan keahlian khususnya dalam bidang pariwisata.</p> <p>Strategi Pengembangan pariwisata perkotaan Kota Mataram dianalisis dengan pendekatan analisis SWOT, menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut : Strategi SO (<i>Strength Opportunities</i>) yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Dalam Memasarkan Pariwisata Perkotaan, dan Membuat Peraturan Daerah Dalam Menetapkan Event-Event Pariwisata. Strategi WO (<i>Weakness Opportunities</i>) yaitu: Pengembangan Sarana Pendukung di Setiap Daya Tarik Wisata Perkotaan Kota Mataram, strategi Mengembangkan Aksesibilitas yang dapat memberikan kenyamanan terhadap wisatawan, Promosi Destinasi Pariwisata Bekerjasama dengan <i>Stakeholders</i> yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Mataram (Dinas Pariwisata), Memaksimalkan Anggaran Pengembangan Pariwisata Perkotaan melalui Kerjasama antar <i>stakeholders</i>.</p>
9.	<p>Kristian Buditiawan, Harmono. <i>Strategi Pengembangan Destinasi</i></p>	<p>Penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu Maret-Desember 2019 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (<i>mix method</i>). Metode kualitatif digunakan</p>

¹³ Rizal Kurniansah, Lia Rosida. Strategi Pengembangan Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism) di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. <http://ejurnal.binawakarya.or.id/index.php/MBI Vol.14>, No.2 September 2019

<p><i>Pariwisata Kabupaten Jember¹⁴</i></p>	<p>untuk merumuskan strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal destinasi pariwisata di Kabupaten Jember. Metode kuantitatif digunakan untuk menentukan strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan destinasi pariwisata di wilayahnya. Teknik penggalian data menggunakan wawancara mendalam kepada <i>stakeholder</i> terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember, Pokdarwis, dan tokoh masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.</p> <p>Teknik analisis menggunakan matrik SWOT untuk menginterpretasikan ranah perencanaan, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor eksternal dan internal memegang peran yang sama pentingnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut kemudian dibuat matriks analisis SWOT dengan menjabarkan dan mengkombinasikan masing-masing variabel. Analisis ini berdasarkan pemahaman bahwa penerapan strategi yang tepat didasarkan pada kondisi yang bernilai positif (kekuatan dan peluang) untuk mengatasi keadaan yang kurang menguntungkan di masa depan (kelemahan dan ancaman) (Puspitasari 2014).</p> <p>Strategi pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Jember adalah pertama, pembinaan kepada masyarakat sekitar destinasi pariwisata sebagai subyek dan obyek pariwisata melalui pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) yang akan mengelola suatu destinasi pariwisata. Kedua, peningkatan daya saing produk pariwisata melalui program pembiayaan mandiri, dan ketiga, yaitu mengadakan even wisata yang terintegrasi dengan sektor lain, misal transportasi, UMKM, perdagangan dan jasa, kesehatan, dan lain-lain.</p>
--	---

¹⁴ Kristian Buditiawan, Harmono. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jember. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Universitas Merdeka Malang. Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol.15, No.1, Juni 2020 : 37-50

10.	Ratna Medi. <i>Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.</i> ¹⁵	<p>Pengelolaan potensi pariwisata di daerah Tana Toraja menjadi perhatian khusus pemerintah, hal ini tercermin dalam arah kebijakan (visi) pemerintah bahwa tujuan utama pembangunan pariwisata adalah menjadikan sebagai destinasi kedua setelah Bali. Di sisi lain, dukungan masyarakat Tana Toraja sangat positif memberikan respon pengembangan pariwisata Sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah , pariwisata harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengelolaan pariwisata yang di kemukakan oleh Blakely: koordinator, fasilitator, stimulator, motivator.</p> <p>Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi pariwisata di kabupaten Tana Toraja sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang mencakup Koordinator, peran yang dilakukan pemerintah sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi dan pembuatan strategi. Fasilitator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu, menyediakan sarana dan prasarana dan menciptakan strategi promosi. Stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator belum bagus karena pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Tana Toraja belum melibatkan pihak investor dan pihak swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah hanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Motivator, peran yang dilakukan pemerintah yaitu: memberdayakan masyarakat.</p>
-----	--	---

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek dari yang diteliti merupakan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pariwisata. Untuk metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Walaupun terdapat kesamaan dengan penelitian

¹⁵ Ratna Medi. *Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja.* Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar.

sebelumnya, dalam penelitian ini memiliki perbedaan yakni teori, analisa data, subjek penelitian, dan lokasi atau tempat penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Peran Pemerintah Daerah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁶

Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.¹⁷

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajibannya.

¹⁶ Amba, M. 1998. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove*. (Studi Kasus di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Madya Ambon, Maluku). Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

¹⁷ *Ibid*

Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup 3 aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang

kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh peran pemerintah daerah yang lemah adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Rentang tanggung jawab, fungsi dan kewenangan yang sempit.
- b. Cara penyelenggaraan pemerintah yang bersifat reaktif
- c. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi yang diterima dan tingginya derajat kontrol eksternal

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan bersifat Parsipatif. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusannya diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahannya yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

¹⁸ Muluk, 2005: 62-63

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah tersebut.

2. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dikenal sebagai UU Pemerintah Daerah, sebagai hak yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pernyataan tentang derajat kebebasan didalam pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan sumber daya manusia yang ikut serta dalam usaha memajukan daerah tersebut. Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara terus menerus dengan corak intensitas dan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapabilitas aparatur dan tersedianya sumber daya manusia.²⁰

Dalam kaitannya dengan konteks politik dan pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau condition of living under one's own

¹⁹ http://www.wikipwdia.com/wiki/otonomi_daerah.

²⁰ Widjaya, 2007:17

loss yang berarti otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur oleh own law.²¹

Sedangkan untuk daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam sistem Otonomi Daerah dikenal istilah Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan yaitu :

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Sementara Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Untuk tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi

yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada daerah adalah didasarkan pada beberapa faktor, perhitungan dan tindakan serta kebijakan yang dikeluarkan untuk menjamin daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangga di daerahnya.

3. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 1 berbunyi :

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”.

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Menurut Asshar Refdino pengertian pariwisata berasal dari dua kata yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling, sedangkan pengertian “wisata” berarti pergi. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi.

Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

Menurut Ismayanti pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.

Selanjutnya menurut Hans. Buchli dalam Oka pariwisata adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tersebut.

Beberapa defenisi pariwisata di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang bersifat dinamis dari seseorang atau beberapa orang dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata hendaknya dirancang dan dibangun secara profesional dalam bentuk pengembangan potensi pariwisata

sehingga dapat menarik wisatawan dan mendatangkan jasa layanan yang sangat berguna bagi perkembangan daerah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan itu sendiri merupakan suatu strategi yang dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun masyarakat.

Dalam rangka pengembangan pariwisata ini diperlukan pendekatan terhadap tiga aktor utama yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata menurut Pitana dan Gayatri tiga aktor tersebut adalah Masyarakat, Swasta yang bergerak di sektor pariwisata dan Pemerintah.

Terkait dengan peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata Pendit menyebutkan dua faktor penting terkait peran pemerintah (politik) suatu negara, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, yaitu yang secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan industri pariwisata tersebut. Pertama yang secara langsung mempengaruhi adalah sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawan, kedua

secara tidak langsung yaitu adanya situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik ekonomi serta keamanan dalam negara atau daerah itu sendiri, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan peningkatan sektor pariwisata, lalu rakyat mendukung berbagai kebijakan terkait pariwisata yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Dengan demikian pengembangan potensi pariwisata pada dasarnya merupakan suatu strategi dan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat secara sinergi guna mendorong tumbuh dan kembangnya sektor pariwisata yang akan melahirkan iklim ekonomi yang kondusif bagi negara, daerah serta masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. itu sendiri.

Potensi kepariwisataan merupakan objek yang mempunyai kekuatan dan nilai tambah untuk dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata. Potensi pariwisata dapat digolongkan menjadi:

1. Potensi Alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dan lain-lain (keadaan fisik suatu daerah).
2. Potensi Kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument.

3. Potensi Manusia. Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Potensi pariwisata tentunya akan memiliki daya tarik bagi para wisatawan, karena itu terdapat kriteria-kriteria objek wisata menjadi sebuah potensi pariwisata, pertama, *something to see*; *something to do dan something to buy*. Selanjutnya selain kriteria diatas terdapat faktor yang dapat menjadikan objek wisata menarik yakni kelengkapan sarana dan prasarana objek wisata. Prasarana kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang, sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan. mengenai potensi pariwisata diatas dapat di kemukakan beberapa hal yang substantive terkait dengan yang dimaksud dengan potensi pariwisata yakni, setiap daya tarik wisata memiliki keunikan dan keindahan. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk yang menjadi sasaran utama wisatawan.

Potensi suatu objek wisata akan menjadi lebih optimal lagi jika setiap elemen-elemen terkait terjalin hubungan yang baik sesuai standar yang ada. Untuk itu peran pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah terkait dalam pengembangan objek

wisata perlu ada strategi-strategi yang dijalankan untuk memaksimalkan perannya.

C. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.²²

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang

²² Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6)

diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dia maksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'.²³

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).²⁴

1. Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan.

²³ *Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3)*

²⁴ *Ibid*

Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.

1. pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah

ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.²⁵

Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (output) dan hasil akhir (outcome). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (a serial of decisions) dan tindakan (actions) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

²⁵ Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ,1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135)

Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁶

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustin (2006:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²⁷

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan diatas, secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan implementasi kebijakan. Dalam variasi pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

²⁶ Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139)

²⁷ Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustin (2006:139)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data tertentu yang diinginkan dalam sebuah penelitian. Dalam langkah-langkah ini dilakukan secara ilmiah yaitu rasional, empiris dan sistematis. Sehingga hasil dari penelitian ini berguna untuk kehidupan masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan yang logis.²⁸

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk penelitian yang memerlukan pengungkapan secara mendalam tentang fenomena alam atau sosial karena penelitian kualitatif deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam situasi tertentu termasuk pandangan aktivitas, hubungan dan proses-proses yang akan berlangsung serta sebab-akibat yang terjadi dari semua fenomena tersebut.

Sugiono menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan tata cara yang memakai filsafat positivisme selaku landasan utama, penelitian ini digunakan untuk meneliti obyek alam, peneliti merupakan kunci utama penelitian, metode pemilihan informan lewat triangulasi, analisis informasi bersifat

²⁸ Sugiyono. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabet. 2009) 2.

induktif serta kualitatif dan hasil yang diperoleh lebih mengarah ke substantif daripada generalisasi.²⁹

Filsafat positivisme melihat bahwa fenomena / gejala/ realitas dapat diklasifikasikan, bisa diamati, konkrit, teratur dan adanya hubungan sebab-akibat.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Deskriptif kedalaman informasi tidak dibatasi sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penelitian.³¹

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, dimana penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Ngawi dan beberapa tempat wisata di Kabupaten Ngawi yang berkaitan dengan judul penelitian ini sendiri tentang Peran Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi.

Pemilihan lokasi penelitian di DISPARPORA Kabupaten Ngawi adalah karena OPD (Organisasi Perangkat Daerah) inilah yang memiliki

²⁹ Albi Anggito dkk. Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 8.

³⁰ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2018) 8.

³¹ M. Bungin. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran (Jakarta: Prenanda Group, 2014) 29.

kemampuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan teknis dalam mengembangkan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi serta Pengelola tempat pariwisata yang memiliki wewenang untuk mengatur obyek pariwisatanya dan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata tersebut.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Januari 2023 s/d Maret 2023.

C. Pemilihan Subjek Penelitian

Subyek penelitian ialah informan yang bisa memberikan informasi terkait fenomena yang berkaitan dengan tema penelitian. Pemilihan subyek penelitian ini memakai metode purposive sampling sehingga informasi yang diperoleh terpenuhi secara lengkap dan komprehensif.³²

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan di bidang pariwisata di Kabupaten Ngawi, pengelola pariwisata, dan terakhir wisatawan yang berkunjung untuk berwisata, akan menjadi subyek penelitian yang akan dilirik serta Pengelola tempat pariwisata yang memiliki wewenang untuk mengatur obyek pariwisatanya dan wisatawan yang berkunjung.

³² Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 28

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan data yang akurat, untuk itu informan yang akan dipilih ialah :

Tabel 3. Nama & Keterangan Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Yoyok Sulistyanto S,Sos	Kepala Bidang Pariwisata
2.	Wiwien Purwaningsih S.Sos	Kepala Bagian Pemberdayaan SDM
3.	Yuwono Kartiko, S.E, M.M	Komisi III DPRD Ngawi
4.	Hari Prasetyo	Pengeelola Tempat Wisata Kebun The Jamus
5.	Danang	Wisatawan di Benteng Van Den Bosch
6.	Aris	Wisatawan di Benteng Kebun Teh Jamus

D. Tahapan Penelitian

Yang menjadi tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Pemilihan dan Analisis Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terkait dengan masalah yang akan diambil oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam penyelidikan apapun tahap awal tidak lebih dari menentukan masalah untuk diselidiki. Subyek dapat tercermin dalam judul atau subyek suatu penelitian. Masalah utama menjadi jelas dalam hal batas-batas ruang lingkup dan pentingnya setelah analisis subjek yang bersangkutan, Tinjauan literatur juga diperlukan yang mencakup studi hasil penelitian yang terkait dengan topik yang diselidiki.

Menggunakan data dari penelitian sebelumnya dapat menambah kekayaan pengetahuan, konsep dan teori tentang topik masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat memperjelas hal-hal yang penelitian sebelumnya telah menemukan jawabannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap jawaban terkait dengan kesulitan yang akan ditempuh oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam setiap penyidikan tahap awal tidak lebih dari penentuan masalah yang akan dicari. Subjek dapat tercermin dalam judul atau subjek penelitian. Setelah menganalisis subjek yang ada, isu-isu kunci menjadi jelas dalam hal batas ruang lingkup dan relevansi. Tinjauan literatur juga diperlukan, yang terdiri dari temuan makalah penelitian yang terkait dengan subjek yang dipertahankan. Menggunakan data dari penelitian terdahulu dapat menambah jumlah pengetahuan, konsepsi dan teori mengenai isu dari masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat mengklarifikasi hal-hal yang telah ditemukan jawabannya oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Penentuan Metodologi Penelitian

Peneliti menentukan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat dijawab secara memadai. Pada tahap ini perlu ditentukan format penelitian, metode, sumber dan alat pengumpulan data yang digunakan dan terakhir adalah strategi analisis data.

Peneliti memilih metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditangani secara memadai. Pada langkah ini sangat

penting untuk menentukan format studi, metodologi, sumber dan tehnik pengumpulan data yang digunakan dan yang terakhir adalah rencana analisis data.

3. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data pada tahap ini sesuai dengan sumber, metode dan alat pengumpulan data yang tercakup pada tahap kedua. Dengan menggunakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan mengamati situasi, peristiwa, atau lingkungan, peneliti sekarang akan melakukan wawancara dengan responden yang menjadi sumber data penelitian.

4. Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data

Pengolahan data dilakukan oleh peneliti. Penyiapan data merupakan tahapan dalam pengolahan data ini yang menyangkut penentuan kelengkapan, keakuratan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Data yang tidak lengkap dapat diperbaiki dengan mengumpulkan data sekali lagi.

5. Penyusunan Laporan Penelitian

Laporan investigasi ditulis oleh peneliti. Karena laporan penelitian ini memuat informasi sebagai berikut: 1) Pemecahan Masalah, 2) Metode yang Digunakan, dan 3) Hasil yang Ditemukan, maka peneliti membahas apa saja yang ditemukan, bagaiman cara menemukannya dan bagaimana hasil yang telah ditemukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan informasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan Tindakan mengamati dan pencatatan suatu fenomena yang terjadi di wilayah studi dengan penuh perhatian dan langsung untuk memastikan kondisi saat untuk memverifikasi keakuratan rencana yang dilaksanakan untuk penelitian ini.³³

Kegiatan ini melibatkan manipulasi objek dengan tujuan mengalami dan kemudian memahami informasi tentang suatu fenomena yang bersumber pada pengetahuan serta ide yang telah dikenal lebih dahulu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan melanjutkan proses pengumpulan data.

b. Wawancara

Dalam metode wawancara peneliti harus mencoba akrab agar informan menjadi santai ketika menjawab pertanyaan pada metode wawancara agar pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berjalan dengan baik. Wawancara dalam penelitian ini memakai wawancara semi struktur, dimana wawancara ini memakai pedoman wawancara namun masih bisa berubah tergantung arah pembicaraan dalam wawancara, akan tetapi tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan.

³³ Afifudin dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV Pustaka Setis, 2012) 134.

Wawancara juga dilakukan secara mendalam yang bersifat fleksibel, dimana urutan pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kondisi saat wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan strategi yang mendukung atau melengkapi metode observasi dan wawancara, dengan mengabadikan momen dalam kata-kata atau foto. Kamera ponsel, notebook, dan perekam suara adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ini. Peneliti akan mendokumentasikan bagaimana keadaan/kondisi pada saat wawancara berlangsung.

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi dari dokumen, yakni sejumlah catatan rangkaian peristiwa yang telah lalu yang berupa tulisan, foto, Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan lainnya.³⁴

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis akan mengolah data yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.

³⁴ S. Nasution, Metodologi Research Penelitian ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara 2010) 113.

Bagi Miles dan Huberman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan analisis data, yaitu:³⁵

1) Reduksi Data

Proses merangkum, menyeleksi dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Susunan Informasi dalam bentuk uraian singkat berupa informasi yang sistematis melalui sajian data yang memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan.

3) Penarikan kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkap oleh peneliti.

e. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Penelitian Kualitatif seringkali diragukan keabsahan datanya, untuk itu teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data di

³⁵ Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara. 2015) 210.

penelitian ini yaitu Triangulasi yang menggabungkan triangulasi sumber dan teknik. Dengan memadukan beberapa metode pengumpulan data dan sumber data terkini, metodologi triangulasi memverifikasi keakuratan data.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Ngawi

1. Profil Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat, merupakan daerah penghubung dengan Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jakarta yang mempunyai aksesibilitas transportasi cukup ramai.

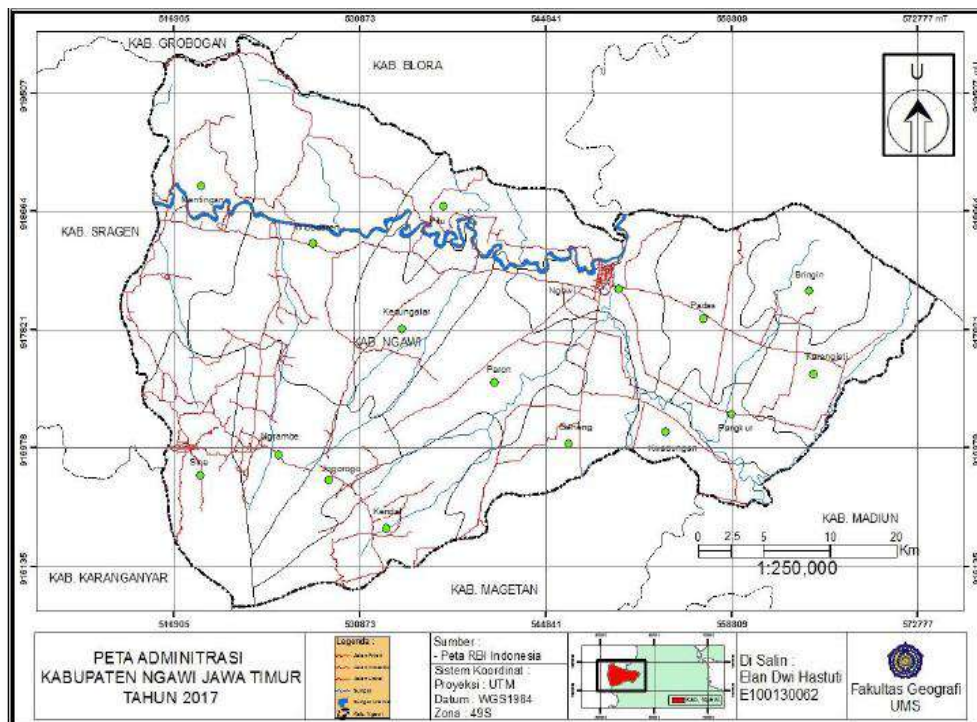
Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.394,74 Km² atau 129.598,51 Ha, secara administratif pemerintahan terbagi dalam 19 Kecamatan, 4 Kelurahan, 213 Desa. Secara Astronomis terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 111°07'-111°40' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah)
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-17 Kabupaten terluas se-Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PerDa)

Kabupaten Ngawi Tahun 2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 Kecamatan.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Ngawi



(Sumber : RPJMD Kabupaten Ngawi)

Kabupaten Ngawi terdiri atas 19 Kecamatan yang terbagi dalam 217 desa dan 4 Kelurahan dan memiliki Pusat pemerintahan di Kecamatan Ngawi, berikut Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi yaitu Kecamatan Bringin, Geneng, Jogorogo, Karangjati, Kedunggalar, Kendal, Kwadungan, Mantingan, Ngawi, Ngrambe, Paron, Pangkur, Padas, Pitu, Sine, Widodaren, Karanganyar, Kasreman. Dan Kecamatan Gerih.

2. Kependudukan

Aspek kependudukan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menggambarkan perkembangan suatu wilayah tersebut. Penduduk Kabupaten Ngawi berdasarkan hasil proyeksi penduduk interin 2020-2023 tahun 2022 sebanyak 877.432 jiwa yang terdiri atas 435.470 penduduk laki-laki dan 441.962 penduduk perempuan. agar bisa dijadikan pembandingan peneliti menyusun jumlah penduduk Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.

Berikut distribusi persebaran penduduk di Kabupaten Ngawi :

No	Tahun	Jumlah Orang
1.	2018	830.091
2.	2019	913.553
3.	2020	870.057
4.	2021	
5.	2022	877.432

(Sumber : RPIJMD Kabupaten Ngawi 2016-2021)

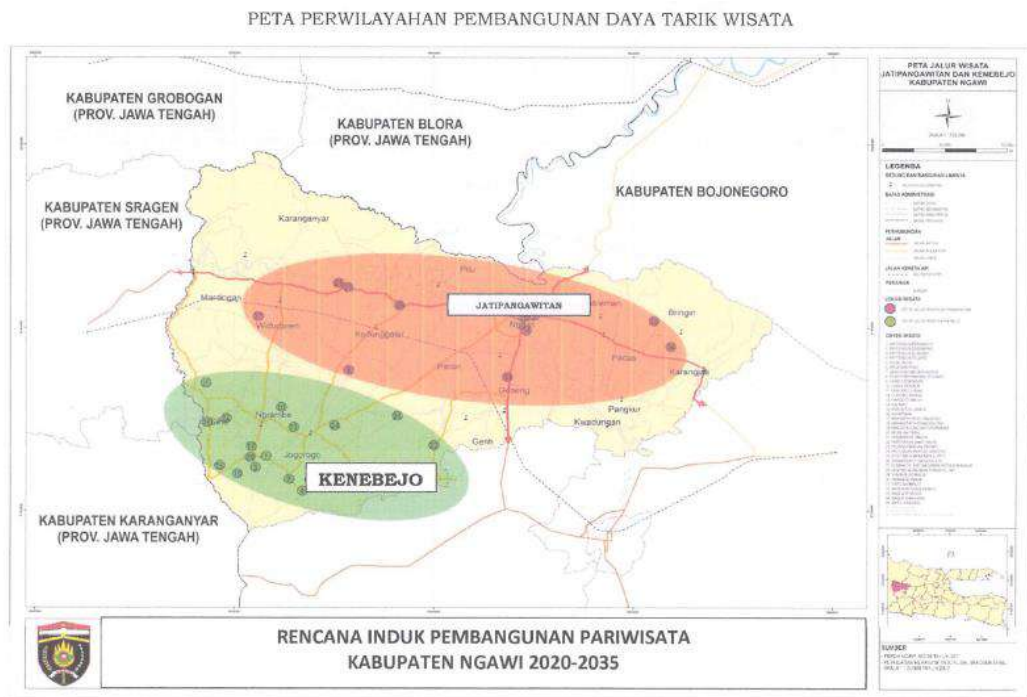
Kondisi perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Ngawi cenderung Fluktuatif seperti yang ditunjukkan oleh Tabel diatas perkembangan jumlah penduduk menunjukkan pada setiap tahunnya jumlah penduduk Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan dan penurunan secara berkala.

3. Perwilayahan Pariwisata

Perwilayahan sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Jalur Jatipangawitan merupakan jalur wisata di bagian utara yaitu didaerah sepanjang jalan utama Ngawi meliputi Museum Trinil, Benteng Van Den Bosch, Arca Banteng, Rumah dr KRT Radjiman, Makam Patih Priggokusumo, Waduk Pondok, Wasuk Sangiran, Waduk Kedung Bendo, Pemandian Tawun, Rest Area Monoumen Soeryo, Tirtonirmolo, Sentra kerajinan Bonggol Jati, Masjid Baiturohman, Kali Mati dan Alun-Alun Ngawi.
- b. Jalur Kenebejo merupakan jalur wisata di bagian selatan yaitu di daerah kaki Gunung Lawu meliputi Kebun The Jamus, Air Terjun Pengantin, Air Terjun Srambang, Air Terjun Suwono, Air Terjun Teleng, Sumber Nogo, Bumi Perkemahan Seloondo, Rumah Batu Hargomulyo, Candi Demangan, Candi Pendem, Gunung Warak, Srigati, Hargo dumilah dan Watu Jonggol.

Gambar 2. Perwilayaha Pariwisata



(Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi)

4. Pariwisata

Perkembangan pada sektor wisata yang ada di Kabupaten Ngawi sangat menjanjikan dan mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Ngawi yang terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Daya Tarik Wisata Budaya

Daya tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai mahluk budaya. Daya tarik wisata budaya memiliki sifat terwujud (tangible) yang berupa Cagar Budaya dan sifat tak berwujud (intangible) yang berupa Adat Istiadat, Tradisi dan Kesenian.

Contoh daya tarik wisata budaya yang ada di Ngawi adalah Museum Trinil, Pesangrahan Srigati, dan Benteng Van De Bosch.

b. Daya Tarik Wisata Alam

Daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, daya tarik alam ini berupa waduk, sungai, air terjun dan kebun teh.

Contoh daya tarik wisata alam yang ada di Ngawi adalah wisata Air Terjun Srambang, Kebun The Jamus dan Waduk Pondok.

c. Daya Tarik Wisata Buatan

Daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificial created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Contoh daya tarik wisata buatan yang ada di Ngawi adalah Taman Wisata Tawun, Kolam renang Hargo Dumilah dan Gayam park.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 5. Angka Kunjungan Wisata

No.	Destinasi Wisata	Lokasi (Kecamatan)	Pengelola	Tahun	
				2021	2022
1.	Adess Pool	Ngawi	Swasata	2.553	7,548
2.	Air Terjun Pengantin	Ngrambe	Swasta	3.810	6,904
3.	Argo Munung	Kendal	Pemdes	2.895	6,531
4.	Banyuredjo	Kedunggalar	Swasta	23.542	36,401
5.	Prahu Laga Pool	Padas	Swasta	5.595	6,097
6.	Gayam Park	Kendal	Swasta	4,853	8,432
7.	Hargo Dumilah	Ngrambe	Swasta	6.724	12,278
8.	Jahe Klenting	Kedunggalar	Swasta	8.220	7,875
9.	Kayangan	Jogorogo	Pemdes	10.500	49,490
10.	Kebun Teh Jamus	Sine	Pemda	33.526	51,091
11.	Keppo Pool	Ngawi	Swasta	8.669	14,509
12.	Monumen Soerjo	Kedunggalar	PEMDA	6.871	10,655
13.	Museum Trinil	Kedunggalar	PEMDA	6.352	15,554
14.	Onggo Joyo	Ngrambe	Swasta	1.470	3,687
15.	Setia Fun	Sine	Swasta	6032	11,806
16.	Srambang Park	Jogorogo	Swasta	18.888	63,064
18.	Sumberkoso	Sine	Pemdes	13.626	36,595
19.	Suwono Indah Park	Ngrambe	Swasta	5.857	11,614
20.	Taman Olba	Gerih	Swasta	9.959	52,324
21.	Taman Wisata Tawun	Kasreman	PEMDA	40.612	95,579
22.	Tirto Nirmolo	Ngawi	Swasta	8.583	18,247
23.	Watu Jonggol	Sine	Pemdes	2.651	4,752
Jumlah Total				238.138	536,318

(Sumber :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi)

Tabel diatas menunjukkan bahwa industri Pariwisata di Kabupaten Ngawi sedang mengalami peningkatan ini terbukti dari data kunjungan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten Ngawi pada tahun 2021 dan 2022.

Dari tahun tersebut terlihat semua obyek wisata yang baerada di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan, terlebih tempat-tempat wisata yang mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan dikarenakan adanya keseriusan dari pengelola wisata ditempat wisata tersebut dan menjadi wisata unggulan dan prioritas di Kabupaten Ngawi.

Salah satu wisata unggulan yang ada di Ngawi adalah :

a. Museum Trinil

Museum Trinil merupakan museum paleoantropologi di indonesia yang letaknya di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tepatnya 13 km dari pusat kota Ngawi. museum ini memiliki luas 24.010 m² dengan bagian utara, timur, dan barat dikelilingi oleh aliran Sungai Bengawan Solo. Kata Trinil Berasal dari kata Tri yang memiliki arti tiga hal tersebut mengarah pada tiga desa yaitu Desa Kawu, Desa Gemarang, dan Desa Ngancar, sedangkan kata Nil Berarti Sungai yang merujuk pada Sungai aliran Bengawan Solo yang berada tepat dibelakang museum serta tempat penemuan fosil pertama.

Sebagai Museum manusia purba satu-satunya di Kabupaten Ngawi, Museum Trinil memiliki berbagai koleksi antara lain fosil manusia

purba *Pithecanthropus Erectus* (bagian tengkorak, tulang paha dan gigi geraham), fosil hewan gajah *stegodon trigonocephalus ivory* (bagian Gading, Tulang paha kanan, gigi geraham), Fosil Banteng dan kerbau purba *Fragmen Costae Bovidae* (bagian tulang rusuk, tengkorak kerbau, dan tengkorak banteng), fosil pendukung yaitu cangkang kerang (*Tridagna Gigas*), Kapak genggam (*Biface*), Rahang Harimau (*Panthera tigris sondaica*).

Selain berbagai koleksi fosil manusia purba maupun hewan purba museum trinil juga memiliki fasilitas penunjang seperti taman bermain, gazebo serta pendopo. Di taman belakang museum juga terdapat bumi perkemahan. Letak museum yang di tengah desa dan di pinggir sungai membuat suasana sejuk dan asri membuat pengunjung semakin betah di area museum. Dengan berbagai fasilitas tersebut menjadikan Museum Trinil tidak hanya sebagai sarana edukasi tetapi juga sarana rekreasi,

b. Air Terjun Srambang

Srambang Park Ngawi adalah salah satu obyek wisata yang berada di Desa Girmulyo Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. Berkonsep taman hutan asri dan air terjun obyek wisata ini menawarkan keindahan yang sanggup memanjakan mata pengunjung maka tidak heran apabila banyak wisatawan yang datang untuk melepas penat. Letaknya yang berada di lereng Gunung Lawu juga membuat udaranya sangat sejuk.

Sejarah munculnya obyek wisata Srambang dimulai pada tahun 1995 waktu itu ada lahar dingin, pohon-pohon hanyut di sungai dan

masyarakat banyak yang melihat, akhirnya oleh pihak Perhutani di buka menjadi obyek tujuan wisata dan dibuatkan jalan sampai air terjun. Setelah itu, pada tahun 2017 atas berkat buah pemikiran dari berbagai pihak dalam hal ini pihak swasta, Perhutani, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar akhirnya dibangun Srambang Park Ngawi ini. Pembangunan berlangsung selama 3 bulan dari bulan Oktober hingga selesai bulan Desember kemudian diresmikan oleh Bupati Ngawi Ir. H. Budi Sulistyono pada tanggal 19 Desember 2017.

Pembangunan yang dilaksanakan di kawasan wisata yaitu pembangunan jalan menuju Srambang Park Ngawi, pembangunan pintu masuk yang dilengkapi dengan pos jaga (pos ini digunakan untuk memungut retribusi dari wisatawan), selain itu juga dibangun berbagai fasilitas diantaranya area parkir yang luas, toilet, kamar mandi, mushola, tempat berfoto, rumah makan, jalan berkelok, Taman Joko Tarub, gubug bambu di tepi tebing, Taman Anjasmara, rumah pohon yang kokoh, saung bambu, belik widodari, jembatan rindu, Taman Dewi Nawang Wulan, Taman Dewi Nawang Sih dan taman bukit berbunga. Biaya retribusi obyek wisata Srambang Park Ngawi Rp 15.000/orang belum termasuk sewa tempat parkir. Untuk parkir kendaraan roda dua 2.000 rupiah sedangkan kendaraan roda empat 5.000 rupiah. Pada kawasan wisata juga terdapat puluhan jasa ojek untuk mengantarkan wisatawan yang tidak ingin berjalan kaki terlalu

jauh, rutenya dari tempat parkir menuju pos jaga pintu masuk Srambang Park Ngawi maupun sebaliknya, biaya untuk ojek wisata 5.000 rupiah sekali perjalanan. Masyarakat Desa Girimulyo menyambut positif atas dibangunnya Srambang Park Ngawi.

c. Kebun The Jamus

Obyek wisata Perkebunan Teh Jamus berada di lereng Gunung Lawu sebelah utara dengan ketinggian 1500 dpl, tepatnya di Desa Girikerto Kecamatan Sine. Dengan menempuh jarak kurang lebih 40 km menggunakan berbagai jenis kendaraan ke arah barat daya Kota Ngawi, akan dapat dinikmati suasana pegunungan dengan lerengnya yang berliku, hijau dan sejuk. Perkebunan The Jamus dikelola oleh PT. Candi Loka yang memproduksi teh dan juga air mineral Jamus yang diambil dari mata air Sumber Lanang.

d. Waduk pondok

Waduk Pondok merupakan pilihan yang tepat bagi para pemancing. Letaknya kurang lebih 16 km ke arah timur Kota Ngawi atau tepatnya berada di Desa Dero Kecamatan Bringin. Obyek ini menawarkan keindahan panorama air dan perbukitan. Fasilitas yang ada adalah wisata air lengkap dengan perahu motor, area pemancingan dan ski air, warung apung dan jaring apung, balai wisata dan gardu pandang. Di Waduk Pondok setiap tahunnya masyarakat setempat mengadakan upacara tradisional yang disebut Keduk Beji.

e. Alas Ketonggo/ Pesanggrahan Srigati

Alas Ketonggo/ Pesanggrahan Srigati merupakan obyek wisata spiritual yang berada di Desa Babadan Kecamatan Paron kurang lebih 12 km arah barat daya Kota Ngawi. Sesuai kepercayaan masyarakat bahwa Alas Ketonggo merupakan pusat keraton lembut atau makhluk halus. Dilokasi ini terdapat petilasan Raja Brawijaya dari Kerajaan Mojopahit yang disebut Pesanggrahan Srigati. Hari yang dikeramatkan adalah hari Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Syuro. Pada hari-hari tersebut para peziarah melakukan tirakatan/semedi dan sekaligus menyaksikan upacara ritual Ganti Langse atau Kelambu.

f. Wisata Monumen Soerjo

Monumen Suryo adalah sebuah tugu/patung peringatan untuk mengenang Gubernur Jawa Timur pertama yang menjadi korban pembantaian PKI pada tahun 1948. monumen ini berada pada kawasan hutan tepi jalan raya Ngawi- Solo Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar kurang lebih 25 km arah barat Kota Ngawi. Fasilitas yang ditawarkan yaitu hutan wisata dan tempat bermain anak-anak, ruang informasi dan tempat penjualan cinderamata, serta mushola dan pasar burung.

g. Taman Rekreasi dan Pemandian Tawun

Pemandian Tawun merupakan taman rekreasi yang terkenal dengan habitat bulus dan sendang yang sumber airnya digunakan untuk menyuplai kolam renang dan mengairi sawah disekitarnya.

Setahun sekali diselenggarakan upacara adat yang disebut Keduk Beji. Obyek wisata ini berada di Desa Tawun Kecamatan Padas kurang lebih 7 km arah timur Kota Ngawi. Fasilitas yang ditawarkan yaitu kolam renang, sendang alam dan habitat bulus, hutan buatan dan taman-taman untuk bersantai, danau buatan dengan perahu dayung dan sarana bermain anak-anak, serta penginapan.

5. Dinamika Sosial, Politik dan Ekonomi

Tabel 6. Indeks Kinerja Utama

Indikator kinerja utama	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	70,75-71,14	70,89-71,89	71,39-71,89
Indeks pembangunan gender	92,25-92,40	92,55-92,85	92,85-93,05
Tingkat pengangguran terbuka	5,3-5,1	5,05-4,8	4,9-4-65
Angka pertumbuhan ekonomi	3,48-4,0	3,7-4,3	4,0-4,6
Presentase penduduk miskin	15,05-14,20	14,6-13,3	14,2-12,9
Indeks gini	0,313-0,311	0,311-0,309	0,309-0,307
Indeks reformasi birokrasi	69,70-70,10	72,50-73,95	74,75-76,20
Indeks kepuasan layanan infrastruktur	58,62-60	60-65	65-68
Indeks resiko bencana	119,71-119,50	119,34-119,11	118,84-117,84
Indeks kesehatan sosial	72,1-75,8	73,1-75,8	76,8-78,5

(Sumber : Bappelitbang Kabupaten Ngawi)

a. Dinamika sosial

1) Kemiskinan

Kondisi Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan kabupaten ngawi harus masalah kemiskinan agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Upaya dalam menanggulangi kemiskinan harus bersifat berkelanjutan sehingga diharapkan kabupaten ngawi mampu keluar dari masalah kemiskinan secepatnya.

dari tabel 6 dapat dikatakan bahwa kemiskinan di Kabupaten Ngawi semakin tahun semakin berkurang dengan menekankan di masalah pendidikan bagi setiap warganya. hal ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Ngawi untuk memngurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi.

2) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator

penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara umum IPM Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020, perkembangan angka tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh meningkatnya kapabilitas pemahaman terhadap pentingnya pendidikan, meningkatnya *skill* atau keterampilan dan kemandirian masyarakat usia sekolah, adanya motivasi dan inovasi belajar dalam kondisi apapun, penerapan *parenting education* dalam lingkungan keluarga dan peningkatan mutu pola pikir dan pendidikan karakter.

“Harapannya dengan adanya peraturan daerah Ripparkab ini mampu mendorong masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan angka Indeks Pertumbuhan manusianya”³⁶

b. Dinamika politik

1) Politik anggaran

“tidak bisa dipungkiri kalo anggaran merupakan masalah terbesar dari industri pariwisata ini apalagi kalo hanya

³⁶ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko selaku Anggota DPRD Komisi 3

mengadalkan APBD saja kurang untuk biaya perawatan, oleh karena itu pemerintah daerah ngawi melakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak swasta dan pemerintah ngawi akan mendukung penuh proses promosinya”³⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor pariwisata merupakan sektor prioritas unggulan yang dijalankan pemerintah namun distribusi anggaran yang belum maksimal membuat tersendatnya perkembangan wisata, namun hal ini dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pihak swasta maupun pemerintahan desa untuk mengelola obyek wisata tersebut

2) Pariwisata merupakan sektor prioritas utama

Sektor pariwisata merupakan sektor prioritas unggulan di periode Presiden Jokowi ini terbukti dengan ditetapkannya sektor pariwisata yang menjadi motor peningkatan devisa dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi indonesia.

“meskipun pemerintah pusat mendorong berkembangnya sektor pariwisata namun bagi pemerintah daerah khususnya ngawi yang belum menganggap sektor pariwisata sebagai sektor prioritas menjadi suatu kendala yang nyata”³⁸

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa belum semua pemerintahan daerah menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor prioritas khususnya Kabupaten Ngawi dikarenakan belum signifikannya dampak yang ditimbulkan oleh destinasi wisata bagi Kabupaten Ngawi, hal ini harus menjadi bahan evaluasi

³⁷ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko selaku Anggota DPRD Komisi 3

³⁸ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko selaku Anggota DPRD Komisi 3

kedepannya agar terjadi kesamaan sasaran dan tujuan antara Pemerintahan daerah dan Pemerintahan pusat.

3) Kerjasama antar sektor

Komunikasi merupakan kunci Dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi terhadap semua pihak terkait, sehingga tidak akan mengakibatkan perbedaan persepsi yang akan menyebabkan perbedaan dalam proses implementasi Perda No.9 Tahun 2020 ini, tahapan komunikasi merupakan langkah utama yang dilakukan Pemerintah Daerah Ngawi.

c. Dinamika ekonomi

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi 2 yaitu kontribusi secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan pariwisata yang diterima langsung oleh pemerintah daerah, dan kontribusi secara tidak langsung yaitu pariwisata dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mampu menciptakan peluang kerja baik bagi tenaga kerja yang tidak terdidik maupun terdidik.

Sebagai contoh di obyek wisata srambang pada awalnya mata pencaharian mereka itu adalah petani dan ketika ada investor masuk dan mengambil alih wisata air terjun srambang kemudian air terjun srambang menjadi salah satu obyek wisata unggulan di kabupaten ngawi beberapa warga desa merubah mata pencaharian mereka.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko selaku Anggota DPRD Komisi 3

B. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Tahun 2020-2035

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2035 merupakan pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah, jadi semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan. Dalam pelaksanaannya RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Dunia usaha dan Masyarakat. Pembangunan Kepariwisata meliputi destinasi pariwisata daerah, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.

Pembangunan Kepariwisata memiliki visi yaitu mewujudkan pariwisata Kabupaten Ngawi yang berkelanjutan, berkualitas, bernilai ekonomis, berwawasan lingkungan dan memiliki ciri khas berdasarkan potensi yang ada. Untuk mewujudkan visi tersebut upaya yang dilakukan adalah Mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah, Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan, Meningkatkan Produk domestik bruto, devisa negara, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat, Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah, Mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi,

Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Pariwisata Daerah.

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

1. Terciptanya berbagai inovasi jenis daya tarik wisata.
2. Tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal.
3. Meningkatkan kualitas paket wisata yang variatif, yang dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku wisata.
4. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.
6. Terwujudnya pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif.

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yang berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan, kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan yang dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dilaksanakan secara terpadu antar lintas sektor, daerah maupun pelaku wisata untuk mendorong kemitraan sektor publik. Arah pembangunan menjadi dasar dari arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan Destinasi Pariwisata daerah meliputi :

1. Pembangunan Daya Tarik Wisata
2. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

4. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata tahun 2020-2035

Peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata mencakup beberapa bidang, sehingga instansi yang mempunyai peran teknis dalam Implementasi Kebijakan Perda No.9 Tahun 2020 melakukan koordinasi dengan semua pihak agar komunikasi bisa berjalan dengan baik sehingga implementasi kebijakan mempunyai hasil yang baik dan tepat sasaran.

Dengan adanya komunikasi akan memberikan informasi terhadap semua pihak terkait sehingga tidak akan mengakibatkan perbedaan persepsi yang akan menyebabkan perbedaan dalam proses implementasi Perda No.9 Tahun 2020 ini, tahapan komunikasi merupakan langkah utama yang dilakukan Pemerintah Daerah Ngawi. Masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting pariwisata harus dilibatkan dalam proses komunikasi ini, pemerintah sebagai Implementator mempunyai peran untuk mensosialisasikan Perda No.9 Tahun 2020 ini.⁴⁰

Pembangunan kepariwisataan meliputi Destinasi pariwisata daerah, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata yang dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Peraturan daerah ini kan Ripparkab yang beracuan dengan Ripparnas dan Ripparprov kemudian baru menjadi Ripparkab. Jadi Ripparkab ini merupakan acuan dari strategi Pembangunan Kepariwisata secara umumnya.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko Selaku Anggota DPRD Komisi 3

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Yuwono Kartiko Selaku Anggota DPRD Komisi 3

RIPPARKAB diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaju ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah, RIPPARKAB sangat penting, karena :

1. Memberikan arahan pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia, manajemen dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengatur peran stakeholder terkait baik lintas sektor, lintas pelaku maupun lintas daerah/Wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Adapun Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah yaitu:

1. Mewujudkan Pariwisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.
3. Meningkatkan Produk domestik bruto, devisa negara, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Daerah.

5. Mewujudkan industri Pariwisata yang mampu mengerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi.
6. Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Pariwisata Daerah.

RIPPARKAB juga menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah, semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan kepariwisataan. Dalam pelaksanaannya RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia Usaha dan Masyarakat.

Adapun peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Ngawi yang sesuai atau sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan ialah :

1. Pembangunan Daya Tarik Wisata

Tabel 7. Kebijakan dan Strategi Daya Tarik Wisata

No	Kebijakan	Strategi
1	Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Wisata b. Memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Lingkungan
2	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas,	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Inovasi Manajemen Daya Tarik Kawasan Pariwisata Daerah b. Memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik wisata
3	Pemantapan daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan Keragaman Daya Tarik Wisata b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah
4	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya	<ol style="list-style-type: none"> a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak

	peningkatan Kualitas	kegiatan Kepariwisataan b. Upaya penataan ruang wilayah dan Potensi Daya Tarik Wisata c. Memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata Per-museum berbasis budaya dan sejarah
--	----------------------	---

(Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi)

Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan daya tarik wisata tak lain untuk mempermudah dalam menjalankan peraturan daerah tersebut.

Pengembangan obyek wisata merupakan bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam rangka penerapan kebijakan atau implementasi potensi atau daya tarik wisata dengan upaya untuk menciptakan langkah-langkah yang secara sistematis dapat menciptakan hasil yang memuaskan.

Pengembangan obyek wisata di Kabupaten Ngawi dapat ditunjukkan dengan hasil wawancara dari Bu Wiwien Purwaningsih yang merupakan Kepala Bagian Pemberdayaan SDM di Bidang Pariwisata yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemerintah mempunyai inisiatif yang sangat besar untuk menyediakan pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung, namun dalam hal ini untuk pengembangan obyek wisata tidak semua tempat wisata di Kabupaten Ngawi dikelola oleh Pemerintah daerah oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, Pihak Swasta selaku Pengeola dan Masyarakat sekitar.⁴²

Pernyataan Bu Wiwien tersebut sejalan dengan pernyataan Pak Yoyok Sulistyono selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda

⁴² Wawancara dengan Bu Wiwien Purwadingsih S.Sos Pada Tanggal 5 Januari 2023

dan Olahraga di Kabupaten Ngawi yang ditunjukkan dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Yang pertama tentang regulasi, Karena kita tahu tidak semua obyek wisata di Kabupaten Ngawi dikelola oleh Pemerintah Daerah ada yang dikelola oleh pihak swasta maupun Pemerintah Desa. Jadi regulasinya harus jelas dengan adanya MoU dengan pihak pengelola dan yang kedua bagaimana meningkatkan tata kelola obyek wisata, sarana prasarana-nya, sumber daya manusainya dan yang utama adalah proses promosinya⁴³.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yaitu pemerintah daerah tidak bisa ikut campur secara langsung dalam proses pengembangan obyek dan peningkatan daya tarik wisata namun pihak swasta dan Pemerintah Desa ikut menjalankan program pengembangan pariwisata dan berupaya untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut.

Salah satu contoh pengembangan obyek dan peningkatan daya tarik wisata yaitu :

- a. Penyediaan sarana perkemahan (*camping groun*) di obyek wisata waduk pondok dan waduk sangiran
- b. Pengembangan taman wisata sebagai area sosialisasi, interaksi dan rekreasi
- c. Disediaknya gazebo, dan spot foto untuk menambah daya tarik wisata di Taman wisata tawun

⁴³ Wawancara dengan Bpk Yoyok Sulidtyono S.Sos Pada Tanggal 5 Januari 20023

2. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Tabel 8. Kebijakan dan Strategi Aksesibilitas Pariwisata

No.	Kebijakan	Strategi
1.	Pengembangan dan Peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none">Peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata DaerahPeningkatan Kecukupan Kapasitas angkut moda Transportasi menuju Destinasi Pariwisata DaerahPengembangan keragaman jenis moda transportasi menuju Destinasi Pariwisata Daerah
2.	Peningkatan Kualitas Sarana Transportasi dalam rangka meningkatkan kenyamanan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah	<ol style="list-style-type: none">Kenyamanan moda transportasi menuju dEstinasi Pariwisata DaerahKeamanan Moda Transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan menuju Destinasi Pariwisata Daerah

(Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi)

Sarana infrastruktur menuju tempat wisata sangat mempengaruhi ketertarikan pengunjung untuk datang, pengunjung akan merasa nyaman menuju tempat wisata dengan kondisi jalan yang bagus dan lancar, disinilah peran pemerintah sangat diperlukan agar selalu memperhatikan fasilitas penunjang pariwisata, ketika ditanya tentang kondisi infrastruktur, Yoyok sulistyono selaku Kepala Bidang Pariwisata menyatakan bahwa :

Kondisi jalan menuju objek wisata di kabupaten ngawi masih cukup baik dan di beberapa tempat sudah dilakukan pembenahan, dalam hal ini dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera memperbaiki kondisi jalan, meningkatnya kunjungan wisatawan ke obyek pariwisata di kabupaten ngawi tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah. kondisi jalan yang baik sangat berdampak terhadap tingginya intensitas pengunjung di obyek wisata.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara Dengan Bpk Yoyok Sulistyono S.Sos Pada Tanggal 5 Januari 2023

Disisi lain menurut Bu Wiwien Purwaningsih pengembangan aksesibilitas di Kabupaten Ngawi belum maksimal dalam wawancaranya yaitu :

Untuk akses menuju Destinasi Wisata Pemerintah Daerah Ngawi belum bisa maksimal dikarenakan banyaknya tempat wisata yang jauh dari pusat kota dan tidak ada moda transportasi yang mendukung.⁴⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan aksesibilitas menuju tempat Pariwisata belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor yang membuat pengembangan tidak berjalan maksimal.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Ngawi memberikan perhatian serius kepada industri Travel Agent dan Persewaan Mobil, Pemerintah mendorong agar wisatawan yang berlibur ke Kabupaten Ngawi untuk melakukan penyewaan mobil atau menggunakan jasa agent travel sebagai tour guide sebagai salah satu jalan keluar, seperti : Abisatya Tour & Travel, Ganena firdaus tour, Adinata Tour, Indotama, Tukang dolan dan Sven Tour Travel

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tabel 9

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan	a. Pemberian Insentif untuk pengembangan Prasarana Umum,

⁴⁵ Wawancara dengan Bu Wiwien Purwaningsih S.sos Pada Tanggal 5 Januari 2023

	Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah	Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata b. Peningkatan Fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata c. Perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan peningkatan daya saing wisata
2	Peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya daing Destinasi Pariwisata Daerah	a. Penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Swasta b. Penerpan berbagai skema kemandirian pengelolaan c. Penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus
3	Pengendalian Prasarana umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata Daerah	a. Penyusunan regulasi perizinan b. Penegakan peraturan perundang-undangan

(Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi)

Pengembangan sarana dan prasarana juga harus dilakukan untuk memberikan dukungan ke pengelola tempat wisata tersebut, hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Pak Yoyok Sulistyono selaku Kepala Bidang Pariwisata sebagai berikut :

Perlu diketahui bahwa Destinasi Pariwisata di Kabupaten Ngawi berjumlah lebih dari 30 tempat wisata, oleh karena itu sarana dan prasarana sangat penting terutama sarana jalan, dikarenakan bukan wilayah kami untuk memperbaiki jalan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas terkait, yang kedua adalah sistem penerangan dan yang tak kalah penting yaitu pemerintah bekerjasama

dengan BUMD setempat tentang air untuk memenuhi kebutuhan disana, selain itu penambahan toilet dan gazebo untuk menunjang kenyamanan pengunjung.⁴⁶

Adapun tanggapan dari Bu Wiwien adalah sebagai berikut :

Kebanyakan hotel, café dan restoran di Kabupaten Ngawi berada dipusat kota jika digunakan untuk wisatawan luar daerah yang ingin dekat dengan lokasi pariwisata akan sulit, oleh karena itu pemerintah mendorong warga sekitar tempat wisata untuk menyediakan homestay, namun belum semua tempat wisata di ngawi mempunyai homestay.⁴⁷

Adapun pernyataan Pak Yoyok Sulistyono dan Bu Wiwien sejalan dengan pernyataan Pak Danang dan Pak Aris selaku wisatawan yang mengunjungi tempat wisata di Kabupaten Ngawi :

Pemerintah Daerah akhir-akhir ini giat untuk meningkatkan obyek pariwisata di Kabupaten Ngawi, mungkin karena semakin banyaknya pariwisata unggulan di daerah lain Wisata benteng pendem ini semakin bagus setelah dilakukan revitalisasi bangunannya bergaya eropa dan juga jalan setapak yang dibuat mengelilingi benteng sehingga kita bisa melihat seluruh sisi dari benteng pendem ini.⁴⁸

Wisata di Kebun Teh Jamus semakin bagus dengan ditambahkan rusa dan camping ground membuat kebun the jamus semakin menarik apalagi ketika disana kita bisa berbaur dengan petani teh.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya upaya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata sebagai upaya pengembangan strategi pada prinsipnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tujuan yang hendak dicapai dan metode penggunaan sarana-prasarana.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk Yoyok Sulistyono pada Tanggal 5 Januari 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Bu Wiwien Purwaningsih Pada Tanggal 5 Januari 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Pak Danang

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Aris

4. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Tabel 10. Kebijakan & Strategi Pemasaran dan Promosi Pariwisata

No	Kebijakan	Strategi
1	Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di daerah	a. Penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di daerah b. Penguatan dukungan terhadap badan promosi pariwisata c. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi
2	Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di luar daerah	Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan

Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi

Pengembangan aktivitas pemasaran dan promosi pariwisata dilakukan untuk memberikan informasi kepada wisatawan dengan tujuan yaitu memberikan pengaruh agar mengunjungi tempat wisata yang ditawarkan. Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi dalam aktivitas pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata dapat diketahui bahwa hasil wawancara dengan Pak Aris selaku

Pengunjung di tempat wisata Kebun Teh Jamus sebagai berikut :

Dinas Pariwisata harus melakukan promosi dengan memanfaatkan berbagai media, mengingat banyaknya masyarakat yang memakai media sosial. Selain itu harus dibuatkan peta wisata atau arahan yang jelas menuju lokasi wisata, karena tidak semua tahu destinasi wisata yang ada di Ngawi itu letaknya dimana saja kan jadi susah, untuk strategi pemasaran kebun the jamus sudah bagus dikarenakan ketika kita membayar tiket ke tempat wisata ini sekaligus kita mendapatkan the hijau asli jamus.⁵⁰

Pernyataan Pak Aris sejalan dengan Pernyataan Pak Yoyok Sulistyono selaku Kepala Bidang Pariwisata didalam wawancaranya sebagai berikut :

⁵⁰ Wawancara dengan Pak Aris

Promosi merupakan bagian penting dalam pengembangan Kabupaten Ngawi, promosi disini kita menekannya menggunakan 2 media yaitu media sosial dan media elektronik, untuk media sosial kita bisa lewat Instagram, Facebook dan Twitter dan untuk media cetaknya kita bisa membuat baliho. Dan juga kami juga memiliki web pusat informasi pariwisata, itulah strategi kita untuk melakukan promosi.⁵¹

Aktivitas pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah daerah dalam upaya untuk pengembangan wisata yang terdapat di Kabupaten Ngawi.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tujuan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata merupakan upaya untuk memberikan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan nilai jual dari tempat wisata tersebut supaya wisatawan dapat menikmati dan mengunjungi tempat wisata yang ada.

Dapat dikatakan bahwa pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Kabupaten Ngawi bertujuan untuk memberikan dukungan dalam upaya untuk menarik perhatian masyarakat, memberikan pemahaman dan mengembangkan pemahaman tentang keuntungan obyek wisata yang ditawarkan.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 11. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan potensi, kapasitas dan kebutuhan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan

⁵¹ Wawancara dengan Pak Yoyok Sulistyono Pada tanggal 5 Januari 2023

	penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	kepariwisataan b. Pemberdayaan, potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan c. Penguatan kelembagaan Masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
2	Optimalisasi pengarus-utamaan gender melalui pembangunan Pariwisata	a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender b. Peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender
3	Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata	a. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya daerah sebagai Daya tarik wisata berbasis lokal b. Pengembangan potensi sumber daya daerah melalui kampung wisata

(Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi)

Upaya pengelolaan tempat wisata di Kabupaten Ngawi dapat ditunjukkan dari wawancara dengan Pak Aris selaku pengunjung di obyek wisata Kebun The Jamus :

Menurut saya masyarakat di sekitar tempat wisata ini terdampak secara ekonomi dikarenakan banyaknya toko dan warung makan yang buka disekitar kebun the jamus dan juga ada toko cinderamata dan kaos bertulisan kebun the jamus dan yang tak lupa ketika masuk ke tempat wisata kita diberi oleh-oleh berupa the hijau khas jamus.⁵²

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupatten Ngawi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung dan melakukan pengelolaan tempat wisata ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Yoyok Sulistyono selaku Kepala Bidang Pariwisata sebagai berikut :

⁵² Wawancara dengan Pak Hari Prasetyo

Dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak bisa ikut campur tangan secara langsung namun kami berusaha membantu tanpa menyalahi regulasi yang telah berlaku dengan memberikan diklat atau pelatihan, meningkatkan kelembagaan di obyek wisata tersebut dalam hal ini yaitu karang taruna dan pokdarwis.⁵³

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memiliki keseriusan dalam pengembangan sumber daya manusia.

6. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Tabel 12. Kebijakan & Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

No	Kebijakan	Strategi
1	Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan daerah	Reposisi urusan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah
2	Optimalisasi koordinai antar SKPD	Perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor
3	Optimalisasi organisasi kepariwisataan swastadan masyarakat	a. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan kepariwisataan b. Mengembangkan dan merevitalisasi organisasi masyarakat

(Sumber : Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Ngawi)

Lembaga kepariwisataan merupakan pelayanan tambahan yang dapat memberikan wisatawan rasa aman dan terlindungi. Kelembagaan pariwisata mencakup berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran destinasi wisata tersebut.

Organisasi yang terkait dalam hal ini antara lain dari pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, komunitas pendukung kegiatan pariwisata, asosiasi kepariwisataan seperti pengusaha

⁵³ Wawancara dengan Bpk Yoyok Sulisyono pada Tanggal 5 Januari

perhotelan, biro perjalanan wisata, pemandu wisata dan stakeholder yang berperan dalam pengembangan kepariwisataan.

Bu Wiwien selaku staf bidang pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyebutkan bahwa :

“Untuk organisasi kepariwisataan kita ada Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) dan BumDes setempat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalankan pariwisata di daerahnya, kemudahan ada juga program duta wisata yang memiliki tugas untuk mempromosikan wisata dan sebagai pemandu pariwisata.”⁵⁴

Peran kelembagaan pariwisata merupakan sebuah upaya untuk memperkuat program pariwisata di desa, mulai proses pembuatan kebijakan, pengaturan kewenangan, sistem organisasi dan komunikasi pariwisata di desa, dilanjutkan dengan pemetaan potensi wilayah hingga penentuan model atau jenis wisata yang akan diterapkan.

D. Faktor yang Membuat Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi Tertinggal Oleh Daerah Lain.

Berdasarkan realitas peran pemerintahan daerah dalam pengembangan pariwisata di atas terdapat beberapa kendala yang membuat Sektor Pariwisata di Kabupaten Ngawi tertinggal oleh daerah lain, antara lain :

a. Kurangnya Koordinasi Antar Stake holder

Kurangnya koordinasi menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan objek wisata alam Bantimurung khususnya, Sehubungan dengan hal tersebut di atas juga diperkuat dengan hasil

⁵⁴ Wawancara dengan Bu Wiwien Purwoningsih S.Sos pada Tanggal 5 Januari 2023

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Yoyok Sulistyono S.Sos selaku Kepala Bidang Pariwisata di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

“Pengembangan wisata menyangkut berbagai instansi yang terkait baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi dari semua pihak yang berkepentingan. Kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab mengelola seringkali mengakibatkan perkembangan wisata tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Beberapa Objek wisata masih dikelola oleh pihak. Pemerintah Daerah. Perlu ada solusi jalan tengah penertiban pengelolaan wisata.”⁵⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengembangan potensi pariwisata sangat diperlukan koordinasi dari berbagai instansi yang terkait baik swasta maupun pemerintah untuk mengelola pariwisata di Kabupaten Ngawi

b. Keterbatasan Dana

Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi wisata, Kabupaten Ngawi membutuhkan dana yang besar untuk pengembangan pariwisatanya, namun kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana seperti dikatakan oleh Bu Wiwien Purwaningsih selaku Kepala bagian SDM sebagai berikut:

“Mayoritas Anggaran yang diberikan kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ngawi digunakan untuk pembangunan fisik atau untuk membangun objek wisata, padahal sangat dibutuhkan anggaran lebih lebih besar untuk pelestarian kebudayaan, pengembangan potensi pariwisata yang ada, penyediaan sarana dan prasarana wisata, serta perbaikan infrastruktur akses menuju lokasi wisata alam ”

⁵⁵ Wawancara dengan Bpk Yoyok Sulistyono pada Tanggal 5 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterbatasan dana yang diberikan kepada Dinas Pariwisata merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Ngawi.

Faktor dana dalam pengelolaan objek wisata karena objek wisata alam perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang merupakan penunjang minat wisata para pengunjung. Apabila Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hanya mengandalkan APBD dalam pengelolaan objek wisata ini maka tentunya akan sulit terpenuhi, sedangkan objek wisata alam ini membutuhkan banyak anggaran. Untuk itu perlu adanya kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta maupun investor lainnya.

c. Perkembangan SDM kepariwisataan

Pengetahuan tentang kepariwisataan masih kurang karena kurangnya pelatihan dan bimbingan, jumlah SDM yang kurang, demikian pula pengetahuan tentang konservasi kawasan, tentang daya dukung ekonomi dan lingkungan, hingga kreativitas yang masih minim dan tidak didukungnya fasilitas dan sarana prasarana. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan kapasitas kepariwisataan, pembangunan berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, daya dukung lingkungan, pelatihan ekonomi kreatif yang diversifikasi usaha ekonomi kawasan. Semuanya merupakan agenda yang secara bersamaan perlu diimplementasikan untuk meningkatkan mutu SDM.

Rendahnya sumber daya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang Pariwisata merupakan kendala yang seringkali muncul dalam proses pengelolaan wisata sehingga menjadi faktor yang memuat sektor pariwisata di Ngawi tertinggal oleh daerah lain yang menjadikan potensi wisata yang dimiliki tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau program-program yang telah ditetapkan.

d. Interpretasi, promosi dan komunikasi yang belum efektif

Kembali lagi masalah SDM pariwisata selain kurang terampil dalam pelayanan masalah lain adalah dalam hal komunikasi dan promosi. Meskipun promosi sudah banyak terbantu melalui media sosial namun ketika wisatawan tiba di Ngawi dan ingin menuju ke tempat destinasi pariwisata mereka kebingungan karena tidak adanya papan penunjuk arah ke lokasi pariwisata dan peta lokasi yang seharusnya ada agar memudahkan wisatawan ketika berkunjung.

e. Masih kurangnya pengelolaan wisata

Kurangnya pengelolaan kepariwisataan ini melibatkan berbagai pihak yakni masyarakat lokal, pihak swasta maupun Pemerintah Daerah, masih ada beberapa masyarakat lokal yang belum sadar sepenuhnya akan potensi wisata di daerahnya, pihak pengelola yang kurang aktif melakukan promosi dan sosialisai kepada warga sekitar serta pihak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memprioritaskan pembangunan pariwisata. Sektor pariwisata khususnya

di bidang pengelolaan objek wisata dan akomodasi belum memiliki pengelolaan yang baik karena keterbatasan pengetahuan dan modal usaha.

f. Terbatasnya Konektivitas antar Destinasi Wisata di Kabupaten Ngawi

Keberadaan destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Ngawi menuntut adanya jalur transportasi yang memadai antar tempat tersebut. Jalur transportasi sangat berpengaruh terhadap pembentukan konektivitas antar destinasi wisata menjadi salah satu paket wisata.

Paket wisata menjadi salah satu hal terpenting dalam upaya meningkatkan persaingan antar daerah dalam sektor pariwisata. Dengan adanya paket wisata diharapkan setiap wisatawan dapat dengan mudah dan nyaman menghabiskan waktunya tanpa harus berlama-lama di jalan untuk menempuh tempat wisata dari satu ke yang lain.

g. Adanya resesi ekonomi global dampak dari wabah covid-19

Pertumbuhan ekonomi dunia sangat berpengaruh terhadap pergerakan wisatawan dan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia khususnya Kabupaten Ngawi. Dengan adanya wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia menjadikan sebuah peradaban baru dalam pola hidup masyarakat tanpa terkecuali kebutuhan rekreasi masyarakat.

BAB V

Penutup

A. KESIMPULAN

Melalui Pembahasan terkait Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Pemerintah Daerah Ngawi dalam Pengembangan Potensi Pariwisata yaitu melaksanakan penyusunan, pendataan, perencanaan, pengkoordinasian kegiatan dan program kerja di bidang Kepariwisata sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Dalam mengembangkan potensi pariwisata pemerintah daerah kabupaten ngawi berpedoman kepada Rencana Induk Pariwisata atau Ripparkab Kabupaten Ngawi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2020 sebagai acuan dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Kepariwisataannya.
2. Kendala muncul dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan potensi pariwisata yang mengakibatkan Pariwisata di Kabupaten Ngawi tertinggal dari Daerah lain, kendala tersebut seperti : kurangnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan dana, pengembangan daya tarik wisata yang belum menarik, lambatnya perkembangan SDM Kepariwisata, promosi yang belum efektif dan kurangnya pengelolaan wisata.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, seperti sarana kebersihan, penginapan, dan paket wisata yang menarik yang membuat pengunjung terkesan.
2. Peningkatan kinerja para pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Ngawi Khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Operator penyelenggara agar lebih ditingkatkan lagi.
3. Adanya inovasi dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Ngawi
4. Perlu adanya pengelolaan pariwisata sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pihak yang mengarah pada pemberdayaan. Diharapkan Dinas Pariwisata mampu menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
5. Perlu adanya evaluasi kinerja agar sinergi dan koordinasi antar stake holder berjalan dengan baik untuk memaksimalkan implementasi dari kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Anggito, Albi dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

B. Bungin, M. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Prenanda Group, 2014.

Afifuddin, dkk, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Nasution, S. Metodologi Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Arikunto, Suhartini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

J. Moelong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Faisal, Sanipah, Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Jurnal

Febrianti Dwi Cahya Nurhadi, Mardiyono, Stefanus Pani Rengu. Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 2, Hal 325-331

Jonsa Alimas, Erly Hasyim, dkk. Peran Pemerintah Kabupaten Simeuleu dalam Pemberdayaan Potensi Paariwisata. Public Administration Journal, 1 (4), 318-334.

- Primandany Sefira Ryalita, Mardiyono, Riyanto. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.4, Hal. 135-143
- Mukhsin Dadan, ST. MT. Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaraatu Kabupaten Tasikmalaya). Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.1
- Bahiyah Choridotul, Wahyu Hidayat R, Sudarti. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. Jurnal Ilmu ekonomi Vol.2 Jilid 1/Tahun 2018 Hal. 95-103
- Masruroh Rina, Neni Nurhayati. Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan. Universitas Kuningan.
- Simamora Rotua Kristin, Rudi Salam Sinaga. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4 (1) (2016): 79-96
- Kurniansah Rizal, Lia Rosida. Strategi Pengembangan Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism) di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Ejournal bina karya Vol 14, No.2 September 2019
- Buditiawan Kristian, Harmono. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Jember. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, Universitas Merdeka Malang. Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol.15, No.1, Juni 2020 : 37-50

Medi Ratna. Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata Buntu Burake di Kabupaten Tana Toraja. Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar.

Undang-Undang

Undang-undang Nomer 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Peraturan Daerah Kabupate Ngawi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupate Ngawi Nomor 9 Tahun 2020-2035



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A